



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

RENSTRA 2025-2029

KECAMATAN NELLE



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur patut kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kasih karena hanya atas berkat dan rahmatNya maka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Nelle Tahun 2025 - 2029 dapat kami selesaikan setelah melewati beberapa tahapan perbaikan. Rencana Strategis Kecamatan Nelle Tahun 2025 - 2029 ini akan menjadi pedoman bagi aparatur Kecamatan Nelle untuk bekerja melayani masyarakat Kecamatan Nelle selama Tahun 2025 - 2029. Untuk itu dengan kerendahan hati kami mengajak semua pihak yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja aparat Kecamatan Nelle selama Tahun 2025 - 2029 dapat bekerja sama dan bersinergi secara baik untuk memberikan pelayanan yang prima yang menjadi tuntutan masyarakat saat ini.

Kiranya Rencana Strategis Kecamatan Nelle Tahun 2025 - 2029 ini diberkati oleh Tuhan maha kuasa, maha pengasih dan penyayang sehingga kami dapat melaksanakan tugas pelayanan secara baik dan benar untuk melayani masyarakat Kecamatan Nelle.

Nelle, September 2025

Pt. Camat Nelle,


AGUSTINUS J. LAUFAN DA CUNHA, S.Sos
PEMBINA
NIP. 1974080 200604 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Umum Kecamatan Nelle	9
2.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Nelle.....	9
2.1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Nelle.....	23
2.1.3. Sumber Daya Kecamatan Nelle.....	34
2.1.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan.....	39
2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan di Kecamatan.....	44
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Nelle.....	44
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Nelle.....	44
2.2.2. Isu Strategis	46
BAB III TUJUAN , SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN	48
3.1. Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Nelle 2025-2029.....	48
3.2. Sasaran Rencana Strategi Kecamatan Nelle 2025-2029.....	49
3.3. Strategi Kecamatan Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Nelle Tahun 2025-2029.....	52
3.4. Arah Kebijakan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Nelle Tahun 2025-2029.....	53

BAB. IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
4.1	Program Kecamatan Nelle.....	55
4.2.	Kegiatan Kecamatan Nelle.....	59
4.3	Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	71
4.4	Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	87
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	89
4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan.....	91
BAB. V	PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Administratif Desa di Kecamatan Nelle.....	11
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk di Kecamatan Nelle.....	11
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kecamatan Nelle	12
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Nelle.....	12
Tabel 2.5	Jumlah KK Miskin berdasarkan Kriteria di Kecamatan Nelle	12
Tabel 2.6	Jumlah KK Miskin, Penerima Rastra, KIS, PKH, KIP dan Disabilitas.....	13
Tabel 2.7	Luas Lahan Pertanian di Kecamatan Nelle.....	13
Tabel 2.8	Jumlah Kelompok Tani/Ternak di Kecamatan Nelle.....	14
Tabel 2.9	Jumlah Sarana Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Nelle.....	14
Tabel 2.10	Jumlah Sarana Koperasi dan BUMDes di Kecamatan Nelle	14
Tabel 2.11	Jumlah Sarana Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Nelle.....	15
Tabel 2.12	Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Nelle.....	15
Tabel 2.13	Jumlah Siswa dan Tenaga Pendidik di Kecamatan Nelle.....	16
Tabel 2.14	Jumlah Kelompok Kepemudaan dan Kelompok Olah Raga di Kecamatan Nelle.....	16
Tabel 2.15	Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Nelle.....	16
Tabel 2.16	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Nelle.....	17
Tabel 2.17	Jumlah Kelompok Perempuan, Anak dan Remaja di Kecamatan Nelle.....	17
Tabel 2.18	Data Ruas Jalan dan Saluran/Drainase Negara, Kabupaten, Desa dan Lingkungan.....	18
Tabel 2.19	Data Gambaran Perumahan di Kecamatan Nelle.....	21
Tabel.2.20	Data Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan di Kecamatan Nelle.....	21
Tabel 2.21	Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Nelle.....	22
Tabel 2.22	Jumlah Sarana Pos dan Telekomunikasi.....	22

Tabel 2.23	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Nelle Tahun 2024.....	23
Tabel 2.24	Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	33
Tabel 2.25	Tingkat Pendidikan ASN dan PPK Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka.....	34
Tabel 2.26	Jenjang Pangkat/Golongan ASN Kecamatan Nelle.....	34
Tabel 2.27	Jabatan, Jumlah Jabatan dan Jumlah yang menduduki Jabatan.....	35
Tabel 2.28	Sarana dan Prasarana Kecamatan.....	36
Tabel.2.29	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nelle.....	38
Tabel 2.30	Data Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024.....	41
Tabel 2.31	Inti Masalah, Masalah, Akar Masalah, Serabut Masalah.....	44
Tabel 2.32	Teknik menyimpulkan Isu Strategi Kecamatan Nelle.....	45
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Nelle.....	48
Tabel 3.2.	Strategi Kecamatan Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Nelle Tahun 2025-2029.....	49
Tabel 3.3	Tahapan Arah Kebijakan Kecamatan Nelle dari tahun 2025-2029.....	50
Tabel 4.1	Program Kecamatan Nelle.....	52
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Kecamatan Nelle.....	56
Tabel 4.3	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Nelle.....	67
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Kecamatan Nelle.....	82
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nelle.....	84
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Administrasi Kecamatan Nelle.....	10
Gambar 2.	Struktur Organisasi Kecamatan Nelle Tahun 2025.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut. Rencana Strategis merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Renstra ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian visi dan misi kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, serta dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tahun 2025–2029 ini dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, serta memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika pembangunan, dan perubahan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi. Dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan di lingkungan kecamatan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana

pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai Tugas dan Fungsinya masing-masing.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Adapun fungsi dari Renstra Perangkat Daerah yaitu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dimulai dari proses persiapan penyusunan perubahan Renstra yang meliputi pembentukan tim penyusun; orientasi mengenai penyusunan Renstra;

penyusunan agenda kerja tim, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, rancangan awal Renstra, forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Nelle wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 -2029.(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor Tahun 2025 Nomor 149)

22. Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 47).
23. Peraturan Bupati Sikka nomor 52 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
24. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai arah dan pedoman bagi Kecamatan Nelle dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan, sasaran, startegi dan Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung terwujudnya visi dan misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nelle Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah yang lebih terukur kedalam tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah
2. Keselarasan dan konsistensi Renstra perangkat daerah dengan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029; dan

3. Pedoman penyusunan Renja Kecamatan Nelle dari Tahun 2025-2030;
4. Sebagai alat ukur kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN,

Menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, (Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, kelompok sasaran layanan), Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah

BAB V PENUTUP

Berisi penutup dari Rencana Strategis Kecamatan Nelle Tahun 2025-2029

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Kecamatan Nelle

2.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Nelle

a. Keadaan Geografis

Wilayah Kecamatan Nelle merupakan wilayah dengan topografi dan bentang alam terdiri dari dataran rendah sampai dengan perbukitan dan pengunungan dengan derajat kemiringan berkisar antara 15° sampai dengan 35°. Luas wilayah 14,65 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Adapun batas – batas wilayahnya yakni :

Utara : Kecamatan Alok dan Alok Timur

Selatan : Kecamatan Bola dan Kecamatan Lela

Timur : Kecamatan Alok Timur

Barat : Kecamatan Koting dan Kecamatan Alok Timur

Orbitasi Desa terhadap Pusat Kecamatan dan Kabupaten berkisar antara 0,5 sampai dengan 5 km.



Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Nelle

1. Topografis

Pada umumnya wilayah Kecamatan Nelle terdiri dari pengunungan dan perbukitan dengan luas wilayah 14.65 km², berada di bagian selatan Kota Maumere dengan jarak tempuh antara 3 s/d 9 km berada pada ketinggian antara 50 sampai dengan 200 meter dari permukaan laut (dpl).

2. Iklim

Pada umumnya wilayah Kecamatan Nelle beriklim tropis dengan musim kemarau yang panjang berkisar antara bulan Maret s/d Oktober dan musim hujan berkisar antara bulan November s/d bulan Februari dengan rata-rata curah hujan 613,6 mm/tahun.

b. Demografi

1. Pemerintahan

Pemerintahan Kecamatan Nelle membawahi 5 Desa dengan rincian dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Administratif Desa di Kecamatan Nelle

No	Desa	Luas Wilayah	Jumlah BPD	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW	Jumlah Linmas
1	Nelle Urung	340	1	3	10	3	10
2	Nelle Lorang	132	1	4	16	8	16
3	Nelle Wutung	342	1	4	16	7	16
4	Nelle Barat	323	1	3	12	6	12
5	Manubura	326	1	4	19	8	19
	Jumlah	14,65	5	18	73	34	73

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

2. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Nelle keadaan sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 mencapai 1.911 KK dengan jumlah penduduk 6.171 jiwa terdiri dari Laki-laki : 2.918 jiwa dan Perempuan : 3.257 jiwa. Penerima Rastra sebanyak : 325 KK, Penerima PKH : sebanyak : 282 org, Penerima KIS sebanyak : 3.383 org, Penerima KIP : 150 org , KK Miskin sebanyak : 457 dan difabel sebanyak : 70 org dengan rincian dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Jumlah Penduduk di Kecamatan Nelle

NO	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan
1	Nelle Urung	1.551.	467	735	816
2	Nelle Lorang	1.343	428	654	689

3	Nelle Wutung	1.425	455	664	761
4	Nelle Barat	704	233	321	383
5	Manubura	1.148	328	544	604
	Jumlah	6.171	1.911	2.918	3.253

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Tabel 2.3.

Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kecamatan Nelle

No	Desa	Jumlah Penduduk	Katolik	Islam	Protestan	Hindu/ Budha
1	Nelle Urung	1.551.	467	735	816	1.551.
2	Nelle Lorang	1.343	428	654	689	1.343
3	Nelle Wutung	1.425	455	664	761	1.425
4	Nelle Barat	704	233	321	383	704
5	Manubura	1.148	328	544	604	1.148
	Jumlah	6.171	1.911	2.918	3.253	6.171

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Tabel 2.4.

Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencarian di Kecamatan Nelle

No	Desa	Jumlah Penduduk	Petani	PNS	Pegawai Swasta	TNI/Polri	Buruh	Wiraswasta	Lainnya
1	Nelle Urung	1.551.	467	735	816	1.551.	467	735	816
2	Nelle Lorang	1.343	428	654	689	1.343	428	654	689
3	Nelle Wutung	1.425	455	664	761	1.425	455	664	761
4	Nelle Barat	704	233	321	383	704	233	321	383
5	Manubura	1.148	328	544	604	1.148	328	544	604
	Jumlah	6.171	1.911	2.918	3.253	6.171	1.911	2.918	3.253

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Tabel 2.5

Jumlah KK Miskin berdasarkan Kriteria di Kecamatan Nelle

	Desa	Jumlah KK Miskin
1	Nelle Urung	240
2	Nelle Lorang	135
3	Nelle Wutung	44

4	Nelle Barat	114
5	Manubura	164
	Jumlah	697

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Tabel 2.6

Jumlah KK Miskin, Penerima Rastra, KIS, PKH, KIP dan Disabilitas

No	Desa	Jumlah KK Miskin	Jumlah Penerima Rastra	Jumlah Penerima KIS	Jumlah Penerima PKH	Jumlah Penerima KIP	Jumlah Disabilitas
1	Nelle Urung	240					
2	Nelle Lorang	135	53	716	78	96	16
3	Nelle Wutung	44	70	1193	66		16
4	Nelle Barat	114	78	422	64		13
5	Manubura	164	124	1052	74	54	25
	Jumlah	697	325	3.383	282	150	70

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

3. Potensi

a. Sumber Daya Alam

Pertanian dan Peternakan

Luas lahan untuk budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan tanaman kehutanan adalah 1.1465 ha di kecamatan Nelle yang merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan dan Ekonomi Masyarakat dengan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7

Luas Lahan Pertanian di Kecamatan Nelle

No	Desa	Luas Lahan (Ha)	Sorghum (Ha)	Padi (Ha)	Jagung (Ha)	Ubi Kayu (Ha)	Ubi Jalar (Ha)	Kacang Tanah (Ha)	Kacang Hijau (Ha)
1	Nelle Urung	340	-	-	54	51	-	3	8
2	Nelle Lorang	132	-	-	40	28	-	1	3
3	Nelle Wutung	342	-	3	41	46	-	2	2
4	Nelle Barat	323	-	-	47	47	-	1,5	2
5	Manubura	328	-	-	48	43	-	2,5	3
	Jumlah	1.465	-	3	230	215	-	10	18

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Tabel 2.8

Jumlah Kelompok Tani/Ternak di Kecamatan Nelle

No	Desa	Jumlah GAPOKT AN	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Anggota Poktan	Poktan Kelas Pemula	Poktan Kelas Lanjutan	Poktan Kelas Madya	Poktan Kelas Utama
1	Nelle Urung	1	13	218	2	9	2	-
2	Nelle Lorang	1	17	231	2	14	1	-
3	Nelle Wutung	1	14	206	3	9	2	-
4	Nelle Barat	1	11	164	3	7	1	-
5	Manubura	1	14	174	1	12	1	-
	Jumlah	5	69	993	11	51	7	-

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

 Pariwisata dan Kebudayaan

Tabel 2.9

Jumlah Sarana Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Nelle

No	Desa	Jumlah Tempat Wisata	Jumlah Sanggar Seni dan Budaya	Jumlah Kelompok Musik Tradisional	Jumlah Cagar Budaya
1	Nelle Urung	-	2	2	-
2	Nelle Lorang	-	1	1	1
3	Nelle Wutung	1	1	1	-
4	Nelle Barat	-	2	2	-
5	Manubura	-	1	1	-
	Jumlah	1	7	7	1

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

 Koperasi UKM

Tabel 2.10

Jumlah Sarana Koperasi dan BUMDes di Kecamatan Nelle

No	Desa	Jumlah Koperasi	Jumlah BUMDes
1	Nelle Urung	1	1
2	Nelle Lorang	1	1
3	Nelle Wutung	1	1
4	Nelle Barat	1	1
5	Manubura	1	1
	Jumlah	5	5

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

 Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 2.11

Jumlah Sarana Perindustrian dan Perdagangan di Kecamatan Nelle

No	Desa	Jumlah Kios	Jumlah Depot Air Isi Ulang	Jumlah Bengkel	Jumlah Kmplk Pandai Besi	Jumlah Kmplk Tenun Ikat
1	Nelle Urung	25	-	2	-	10
2	Nelle Lorang	10	3	1	-	5
3	Nelle Wutung	20	-	1	-	10
4	Nelle Barat	11	-	-	5	-
5	Manubura	10	-	-	-	6
	Jumlah	76	3	4	5	31

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

b. Sumber Daya Manusia

 Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di Kecamatan Nelle yang merupakan salah satu Potensi untuk

1

pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Nelle

No	Desa	TK/PAUD			SD			SMP			SMK		
		baik	RR	RR	baik	RR	RB	baik	RR	RB	baik	RR	RB
1.	Nelle Urung	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
2.	Nelle Lorang	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
3.	Nelle Wutung	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Nelle Barat	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Manubura	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	9	-	-	8	-	-	2	-	-	1	-	-

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Tabel 2.13
Jumlah Siswa dan Tenaga Pendidik di Kecamatan Nelle

No	Desa	TK/PAUD		SD		SMP		SMK	
		Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru
1.	Nelle Urung	47	4	106	8	323	10	249	10
2.	Nelle Lorang	60	4	120	8	54	8	-	-
3.	Nelle Wutung	30	4	138	16	-	-	-	-
4.	Nelle Barat	24	2	47	9	-	-	-	-
5.	Manubura	30	2	110	9	-	-	-	-
	Jumlah	191	16	521	50	377	18	249	10

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Tabel 2.14
Jumlah Kelompok Kepemudaan dan Kelompok Olah Raga di Kecamatan Nelle

No	Desa	Jumlah Karang Taruna	Kelompok Olah Raga	Kelompok Pemuda	Kelompok PIK Remaja
1	Nelle Urung	1	1	2	-
2	Nelle Lorang	1	-	1	-
3	Nelle Wutung	1	-	1	-
4	Nelle Barat	1	-	1	-
5	Manubura	1	-	1	-
	Jumlah	5	1	6	-

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Kesehatan

Pembangunan Bidang Kesehatan di kecamatan Nelle yang merupakan salah satu Pontensi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Nelle

No	Desa	Puskesmas	Pustu	Polindes	Poskesdes	Posyandu	Rumah Dokter	Rumah Paramedis
1	Nelle Urung	1	-	-	-	3	2	1
2	Nelle Lorang	-	-	1	-	4	-	-
3	Nelle Wutung	-	-	-	1	3	-	-
4	Nelle Barat	-	-	1	1	2	-	-
5	Manubura	-	-	1	1	3	-	-
	Jumlah	1	-	3	3	15	2	1

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Tabel 2.16
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Nelle

No	Desa	Dokter	Bidan	Perawat	Peraawat Gigi	Gizi	Kesling	Prokes	Analisis	Ass. Apoteker	Pra karya	Jurim	Rekam Medik
1	Nelle Urung + Puskesmas	1	11	12	1	1	1	1	1	1	3	1	1
2	Nelle Lorang	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Nelle Wutung	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nelle Barat	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Manubura	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	15	17	1	1	1	1	1	1	3	1	1

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kecamatan Nelle yang merupakan salah satu Potensi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.17
Jumlah Kelompok Perempuan, Anak dan Remaja di Kecamatan Nelle

No	Desa	Klpk BKB	Klpk BKR	Klpk BKL	Forum Anak Desa	Klpk PIK Remaja	Klpk Dasawisma	Klpk UPPKS
1	Nelle Urung	-	-	-	-	-	10	-
2	Nelle Lorang	1	1	1	1	1	16	1
3	Nelle Wutung	-	-	-	-	-	16	-
4	Nelle Barat	1	-	-	-	-	12	-
5	Manubura	2	1	1	-	1	19	1
	Jumlah	4	2	2	1	2	73	2

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

c. Sarana dan Prasarana

 Jalan dan Jembatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan di Kecamatan Nelle dapat digambarkan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.18.
Data Ruas Jalan dan Saluran/Drainase Negara, Kabupaten, Desa dan Lingkungan

No	Ruas Jalan Negara, Kabupaten, Desa & Lingkungan	Lokasi	Panjang (km)	Kondisi		
				Baik (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)
	JALAN NEGARA					
1	Jalan M. S. Sadipun – Nelle	Kec. Nelle	5	5	-	-
2	Drainase M. S. Sadipun – Nelle	Kec. Nelle	1	1	-	-
3.	Jembatan Napunbasar	Kec. Nelle				
	JALAN KABUPATEN					
3	Jalan Nelle – Delang	Desa Nelle Wutung	2	-	2	-
4	Jalan Kloangimat-Natarkode sampai Kloangbola	Desa Nelle Wutung	2	-	2	-
5	Jalan Baluele - Wodonggabo	Desa Manubura	4,2	4,2	-	-
6.	Jalan Kollibuluk - Kode	Desa Nelle Lorang	0,8	0,8	-	-

7	Drainase Nelle - Delang	Desa Nelle Wutung	2	2	-	-
8	Drainase Kloangimat-Natarkode sampai Kloangbola	Desa Nelle Wutung	2	2	-	-
9	Drainase Baluele - Wodonggabo	Desa Manubura	4	4	-	-
10.	Drainase Kollibuluk - Kode	Desa Nelle Lorang	0,8	-	-	-
11.	Jalan Kloangbola - Betlehem	Desa Nelle Wutung	1,5	-	1,5	-
	JALAN DESA					
11.	Jalan Kode – Muukowot Tadabliro	Desa Nelle Wutung	0,4	0,4	-	-
12.	Jalan Tadabliro - Padang	Desa Nelle Wutung	0,2	0,2	-	-
13.	Jalan Woloara – Wodon A	Desa Nelle Lorang	0,2	0,2	-	-
14.	Jalan Woloara - Watutena	Desa Nelle Lorang	0,3	0,3	-	-
15.	Jalan Nelle B - Wolonpaut	Desa Nelle Lorang	0,25	0,25	-	-
16.	Jalan Wolomotong - Lentong	Desa Nelle Lorang	0,5	0,5	-	-
17	Jalan Nelle A – Nelle B	Desa Nelle Lorang	0,2	-	-	-
18.	Jalan Nelle B – Nelle B	Desa Nelle Lorang	0,2	-	-	-
19.	Jalan Enak - Watugong	Desa Nelle Urung	3	0,461	-	-
20.	Jalan Enak - Kolibuluk	Desa Nelle Urung	1,902	1,902	-	-
21.	Jalan Baluele - Bolaregang	Desa Manubura	5	1,8	-	-
22.	Jalan RT.07 Ritat – RT.05 Ritat	Desa Manubura	0,15	-	-	-
23.	Jalan Halat - Natarlorong	Desa Nelle Barat	1,5	1,5	-	-
24.	Jalan Halat - Kloangbeit	Desa Nelle Barat	0,3	0,3	-	-
25.	Jalan RT.003 Halat - Kloangbeit	Desa Nelle Barat	0,6	0,5	-	-
26.	Jalan RT.003 Halat – Kantor Desa	Desa Nelle Barat	0,1	0,1	-	-
27.	Jalan Lepolima – Wanendoen	Desa Nelle Barat	0,3	0,2	-	-
28.	Jalan Kantor Desa - Poskesdes	Desa Nelle Barat	0,1	-	-	-
29	Jalan Natarlorong-Wolonwet	Desa Nelle Barat	0,2	0,2		

30	Jalan Kloangbeit-Halat Gajut	Desa Nelle Barat	0,111	0,111		
31	Jalan Baosak Wolonboga- Dusun Habipiret	Desa Manubura	0,22	0,22		
32	Jalan Lo'it Bola Regang- Dusun Habipiret	Desa Manubura	0,074	0,074		
33	Jalan Lo'it Bola Regang-Dusun Habipiter-Bola Boer	Desa Manubura	0,194	0,194		
	JALAN LINGKUNGAN					
28.	Jalan Natarlorong - Marawatun	Desa Nelle Barat	3	0,57	-	-
35	Jalan Dusun 1 RT03/RW04	Desa Nelle Lorang	0,183	0,183		
No	Ruas Jalan Negara, Kabupaten, Desa & Lingkungan	Lokasi	Panjang (km)	Kondisi		
				Baik (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)
29.	Jalan Natarlorong – Dusun Halat	Desa Nelle Barat	0,8	-	-	-
30.	Jalan Bolat - Marawatun	Desa Nelle Barat	1,4	-	-	-
31.	Jalan Bolakoet - Wolomotong	Desa Nelle Lorang	0,25	-	-	-
32.	Jalan Wodon A – Wodon A	Desa Nelle Lorang	0,5	-	-	-
16.	Jalan Wolomotong - Lentong	Desa Nelle Lorang	0,5	0,5	-	-
17	Jalan Nelle A – Nelle B	Desa Nelle Lorang	0,2	-	-	-
18.	Jalan Nelle B – Nelle B	Desa Nelle Lorang	0,2	-	-	-
19.	Jalan Enak - Watugong	Desa Nelle Urung	3	0,461	-	-
20.	Jalan Enak - Kolibuluk	Desa Nelle Urung	1,902	1,902	-	-
21.	Jalan Baluele - Bolaregang	Desa Manubura	5	1,8	-	-
22.	Jalan RT.07 Ritat – RT.05 Ritat	Desa Manubura	0,15	-	-	-
23.	Jalan Halat - Natarlorong	Desa Nelle Barat	1,5	1,5	-	-
24.	Jalan Halat - Kloangbeit	Desa Nelle Barat	0,3	0,3	-	-
25.	Jalan RT.003 Halat - Kloangbeit	Desa Nelle Barat	0,6	0,5	-	-
26.	Jalan RT.003 Halat – Kantor Desa	Desa Nelle Barat	0,1	0,1	-	-

27.	Jalan Lepolima – Wanendoen	Desa Nelle Barat	0,3	0,2	-	-
28.	Jalan Kantor Desa - Poskesdes	Desa Nelle Barat	0,1	-	-	-
	JALAN LINGKUNGAN					
28.	Jalan Natarlorong - Marawatun	Desa Nelle Barat	3	0,57	-	-
No	Ruas Jalan Negara, Kabupaten, Desa & Lingkungan	Lokasi	Panjang (km)	Kondisi		
				Baik (km)	Rusak Ringan (km)	Rusak Berat (km)
29.	Jalan Natarlorong – Dusun Halat	Desa Nelle Barat	0,8	-	-	-
30.	Jalan Bolat - Marawatun	Desa Nelle Barat	1,4	-	-	-
31.	Jalan Bolakoet - Wolomotong	Desa Nelle Lorang	0,25	-	-	-
32.	Jalan Wodon A – Wodon A	Desa Nelle Lorang	0,5	-	-	-

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Rumah Layak Huni

Pembangunan Sarana Rumah Layak Huni bagi Keluarga Miskin (GAKIN) di Kecamatan Nelle dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.19
Data Gambaran Perumahan di Kecamatan Nelle

No	Desa	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah berlistrik
1.	Nelle Urung	1308	1250	58	1308
2.	Nelle Lorang	1102	1060	42	1102
3.	Nelle Wutung	1008	962	43	1108
4.	Nelle Barat	1021	980	41	1021
5.	Manubura	1051	1011	40	1051
	JUMLAH	5491	5263	224	5491

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan di Kecamatan Nelle dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel.2.20
Data Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan di Kecamatan Nelle

No	Desa	Pemenuhan Air Bersih		Kepemilikan MCK	
		PDAM (KK)	PAH (KK)	Sudah (KK)	Menumpang (KK)
1.	Nele Urung	221	293	325	17
2.	Nelle Lorang	267	295	352	21
3.	Nelle Wutung	316	332	262	-
4.	Nelle Barat	125	165	171	11
5.	Manubura	244	261	231	17
	JUMLAH	1.173	1.346	1.341	66

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Rumah Ibadah

Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Nelle dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.21
Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Nelle

No	Desa	Rumah Ibadah			
		Gereja	Kapela	Masjid	Pura
1.	Nele Urung	-	-	-	-
2.	Nelle Lorang	1	-	-	-
3.	Nelle Wutung	-	-	-	-
4.	Nelle Barat	-	1	-	-
5.	Manubura	-	1	-	-
	JUMLAH	1	2	-	-

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Pos dan Telekomunikasi

Jumlah sarana Pos dan Telekomunikasi di Kecamatan Nelle dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.22
Jumlah Sarana Pos dan Telekomunikasi

No.	Desa	Jumlah Tower Telekomunikasi
1.	Nele Urung	1
2.	Nelle Lorang	-

3.	Nelle Wutung	2
4.	Nelle Barat	-
5.	Manubura	-
	JUMLAH	3

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Sektor Penerimaan Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat vital, terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan karena pajak menjadi sumber utama penerimaan daerah.

Pada tahun 2024 kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi kewenangan daerah terdapat 3.193 wajib pajak yang didistrusikan ke desa dan kelurahan. untuk data PBB selengkapny dapat dilihat pada tabel 2.23 sebagai berikut :

Tabel 2.23
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kecamatan Nelle Tahun 2024

Desa	Target		Relaisasi	%
	SPPT	Target		
Nelle Urung	602	29.094.929	19.921.616	68,47
Nelle Lorang	579	22.649.756	17.295.734	76,36
Nelle Wutung	815	24.021.484	15.138.097	63,02
Nelle Barat	479	15.745.862	6.880.711	43,70
Manubura	718	22.558.461	15.510.729	68,76
Jumlah	3193	114.070.492	74.746.887	65,53

2.1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Nelle

Kecamatan

Keberadaan Kecamatan Nelle didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Nelle di atur oleh Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

a. Struktur Organisasi Kecamatan

Struktur organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

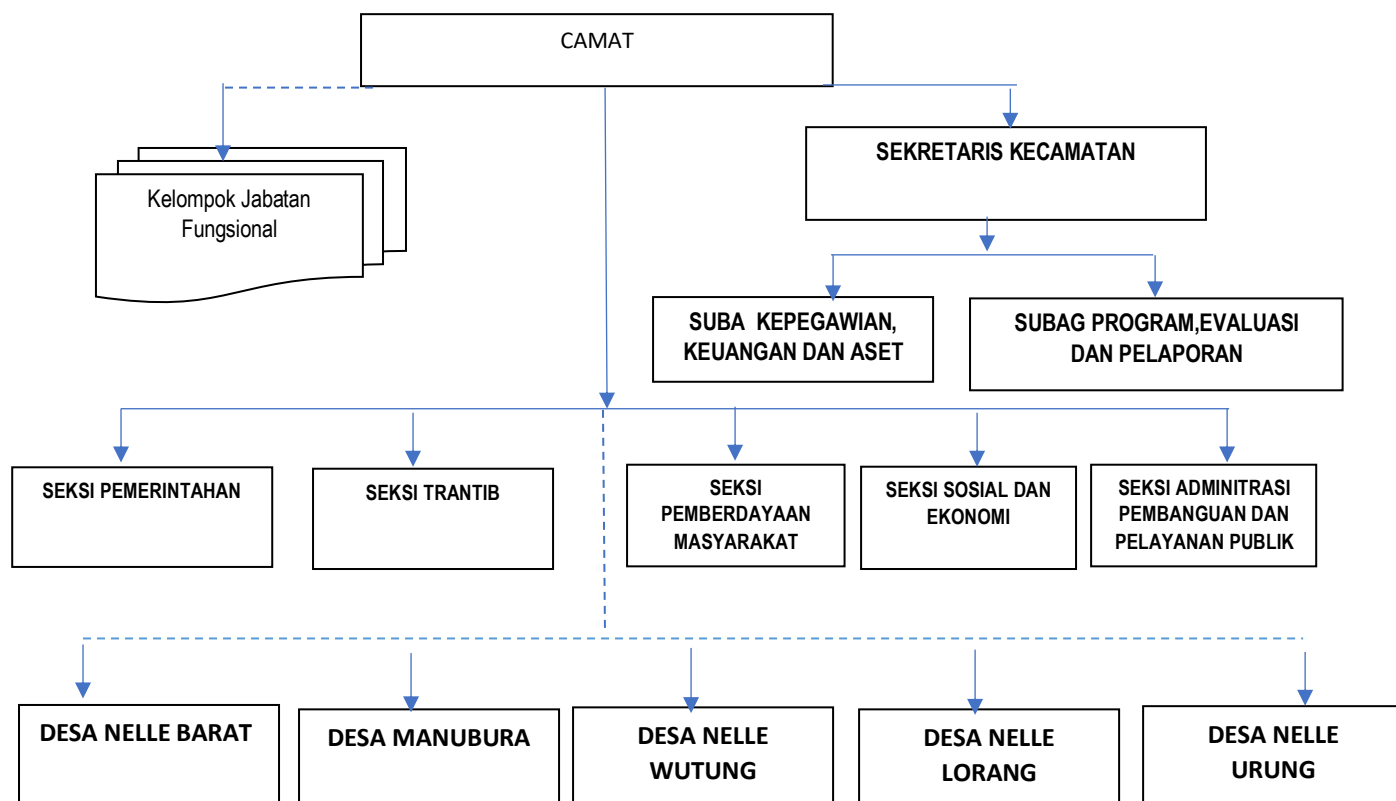
Susunan Organisasi Kecamatan Nelle terdiri dari :

1. Camat;
 2. Sekretaris Camat;
 - a. Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kasubag Kepegawaian, Keuangan dan asset;
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 6. Seksi Sosial dan Ekonomi;
- Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik

Struktur Organisasi Kecamatan Nelle

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Nelle Tahun 2025



Keterangan :

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi - - - - -

Tugas dan Fungsi Kecamatan

Kecamatan Nelle mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; Pengoordinasian upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas :

Mengordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha,

perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan kecamatan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Program dan Anggaran;
- b) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
- c) Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

Membantu Sekretaris dalam menyusun Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- b. Penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
- c. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi warga negeri sipil;
- d. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelola keuangan dan aset;
- e. Pelaksanaan urusan persuratan;
- f. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi Apartur Sipil Negara; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau

kelurahan serta memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- c. Pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan / atau Kelurahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan / atau Kelurahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan;
- h. Penyusunan Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Desa dan / atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa;
- j. Pelaksanaan pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan fasilitasi penataan Desa / Kelurahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa;

- n. Pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawabannya;
- o. Penyelenggaraan lomba / Penilaian Desa / Kelurahan Tingkat Kecamatan;
- p. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- q. Pemberian rekomendasi /pertimbangan pengangkatan perangkat desa;
- r. Pelaksanaan administrasi dan pengordinasian penyelenggaraan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
- e. Pembinaan lembaga adat;

- f. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Kerja Pemerintahan maupun swasta;
- h. Penyusunan Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan produk hukum daerah, pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi social kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi serta penanggulangan masalah social lainnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kerja Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;

- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- g. Pelaksanaan Pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah social lainnya;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

5. Seksi Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas :

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, perana wanita, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan serta perekonomian tingkat Kecamatan.

Seksi Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar diwilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peran

wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;

- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat edukatif dan bahan berbahaya;
- f. Pelaksanaan penyuluh program wajib belajar;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan lembaga perekonomian tingkat kecamatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas

Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan, pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan administrasi pelayanan publik serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, instansi vertikal, dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Seksi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi :

- b. Pelaksanaan mobilitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;

- c. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- e. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan minimal di wilayahnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa / atau Kelurahan;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Instansi vertikal, dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan kepada Masyarakat;
- j. Pelaksanaan pengordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- k. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- l. Pelaksanaan Administrasi Terpadu tingkat kecamatan;
- m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

2.1.3. Sumber Daya Kecamatan Nelle

1. Sumber Daya Aparatur

Kecamatan Nelle berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.24

Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
1.	ASN	2	8	10
2.	PPPK	2	1	3
	Jumlah	4	9	13

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa 76,93% pegawai Kecamatan berstatus ASN dan 23,07% adalah PPPK. Dari jenis kelamin, sebanyak 69,23% adalah laki-laki dan 30,77,% adalah perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Dari Jumlah ASN sebanyak 10 (sepuluh) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.25

Tingkat Pendidikan ASN dan PPK Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SMA	5
2.	DIII	1
3	S1	8
	Jumlah	14

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas 57,15% ASN Kecamatan adalah berpendidikan Strata Satu (S-1), diikuti 7,14% berpendidikan DIII dan 35,71% berpendidikan SMA.

Pegawai Negeri Sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Kecamatan berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.26

Jenjang Pangkat/Golongan ASN Kecamatan Nelle

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Tingkat, I, IV/b	1
2	Pembina, IV/a	1
3	Penata Tingkat I/III d	1
3	Penata/III c	4
4	Penata Muda TK. I/IIIb	1
5	Pengatur Tingkat I/IId	2
6	Pengatur, II/c	1
	Jumlah	11

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa 10% ASN Kecamatan memiliki Pangkat Pembina IV/a, 10% memiliki Pangkat Penata Tingkat I/IIId, diikuti 40% memiliki Pangkat Penata/IIIc, 10% Pangkat Penata Muda/IIId, 20% Pangkat Pengatur Tingkat I/IIId dan pangkat Pengatur/IIc, 10%.

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjejanan sebagai berikut :

Sedangkan berdasarkan jabatan dan eselonering, keadaan ASN Kantor Camat Nelle dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.27

Jabatan, Jumlah Jabatan dan Jumlah yang menduduki Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Jabatan	Eselon	Jumlah yang menduduki Jabatan
1.	Camat	1	III-a	1
2.	Sekretaris Camat	1	III-b	1
3.	Kepala Seksi	5	IV-a	4
4.	Kepala Sub Bagian	2	IV-b	2

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Dari data diatas menunjukan bahwa jumlah jabatan tersebut pada Kecamatan Nelle telah terisi penuh atau lengkap.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28

Sarana dan Prasarana Kecamatan

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Asal Barang
			B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Kantor Camat	1 bidang	1	-	-	-
2	Gedung Kantor Camat	1 unit	-	1	-	-
3	Gedung UUDKP	1 unit	1	-		-
4	Rumah Dinas Camat	1 unit	-	1	-	-
5	Mobil Dinas Camat	1 unit	-	1	-	-
6	Honda Mega Pro	1 unit	1	-	-	-
7	Honda Win	1 unit	-	-	1	-
8	Honda Vario	1	1	-	-	-
8	Laptop	7 buah	4	3	1	-
9	Printer	5 buah	2	3		
10	Lemari	8 buah	8	-	-	-
11	Sofa	2 set	2	-	-	-
12	Wairless	1 buah	1	-	-	-
13	Kursi Rapat	43 buah	-	43	-	-
14	Scener	1 buah	1	-	-	-
15	Meja 1/2 Biro	13 buah	13	-	-	-
16	Meja Biro	3 buah	2	1	-	-
17	PC Unit	2 unit	-	-	2	-
18	Televisi	2 unit		1	1	
19	Infokus	1 buah	1		1	
20	LCD Layar Datar	1 buah	1			
21	Filling cabinet Besi	1 buah	1			
22	Bangku tunggu	1 buah	1			
23	AC	1 buah			1	
24	Rice cooker	1 buah		1		
25	Kursi Putar	3 buah	3			
26	Modem	1 buah	1			
27	Honda Vario 125 CC	1 unit	1			
28	Gorden	3 buah			3	
39	Lemari kayu	8 buah	8			

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nelle sampai dengan saat ini memiliki 1 kompleks perkantoran dan 1 kompleks Stadion Mini Lokan Plading Alexander Idong. Ruang kerja Kantor Kecamatan yang berada dalam satu kompleks tersebut merupakan gedung lama dan bangunan pasca gempa bumi. Hasil kajian Kecamatan menyebutkan bahwa Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Bangunan Perkantoran Kecamatan sebesar 1,42. Ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana bangunan Kecamatan yang ada sesuai dengan jumlah dan jenis kualifikasi namun belum memadai

2.1.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan

a. Pencapaian Kinerja Kecamatan Nelle

Pencapaian Kinerja Kecamatan Nelle dapat dilihat pada tabel 2.29 dibawah ini :

Tabel.2.29

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nelle

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
	Indek Kepuasan Masyarakat				55,71	61,28	67,4	74,15	55,71	61,28	67,4	74,15	100	100	100	100
1	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN)				70	70	80	80	70	70	80	80	100	100	100	100
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan				70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat				70%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum				70%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Sosial dan Ekonomi				70%	70%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik				70%	70%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA KECAMATAN NELLE TAHUN 2025-2029

Sedangkan pada Tahun 2024 terdapat 4 indikator kinerja tingkat capaian kinerja layanan berdasarkan sasaran atau target renstra kecamatan Nelle tahun 2024 telah disesuaikan dengan pendanaan kegiatan dengan tetap mengacu kepada sasaran atau target renstra kecamatan Nlle periode 2024 -2026 gnan mempermudah pengukuran tingkat capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah dapat dilihat pada indikator sebagai berikut ;

1. Tersedianya sarana dan prasarana dengan indikator indeks sarana prasarana sebesar target 0,47 dan realisasi sebesar 0,3592 dengan capaian 76,42 %
2. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik dengan indikator Indikator Kemudahan Akses, Cepat, Akurat dan Akuntabel sebesar 0,46 dan realisasi sebesar 0,15 dengan capaian 32,60 %
3. Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan Indikator Tersedianya SOP sebesar target 0,15 dan realisasi sebesar 0,15 dengan capaian 100%
4. Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik SOP Indikator Jumlah Inovasi sebesar target 0,28 dan realisasi sebesar 0,28 dengan capaian 100%

b. Kinerja Pelayanan dan anggaran Kecamatan

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Kinerja pelayanan dan kinerja anggaran Kecamatan Nelle dapat dilihat pada Tabel 2.30 sebagai berikut :

Tabel 2.30
Data Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran		Realisasi		Selisih Realisasi dengan Anggaran		Capaian Realisasi Anggaran (%)	
	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa
2020	1.013.279.671	399.611.000	961.481.420	397.746.156	51.798.251	1864.844	94,89 %	99,53%
2021	986.727.735	282.682.920	929.911.080	276.043.133	56.816.655	6.639.787	94%	97,65%
2022	995.919.697	236.326.052	902.375.967	219.149.820	93.543.730	17.176.232	90,61%	92,73%
2023	911.646.307	240.842.718	850.600.921	235.680.050	61.045.386	5.162.668	93,30%	97,85%
2024	1.016.918.401	278.552.420	924.997.601	275.715.215	91.940.800	2.801.205	90,95%	98,99%

Sumber : Olahan Kecamatan Nelle Kabupaten Sikka, 2025

2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan di Kecamatan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan mencakup berbagai aspek, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat maka kelompok sasaran layanan Kecamatan meliputi :

- Masyarakat yang berada di wilayah kecamatan yakni warga yang tinggal di desa. Selain itu juga masyarakat luar kecamatan yang memiliki kepentingan terkait wilayah kecamatan
- Pemerintah Desa dan Kelurahan
- DUMDES dan Lembaga-lembaga milik desa dan Kelurahan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Nello

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Nello

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan atau kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu inti masalah adalah **Kualitas Pelayanan Publik belum baik**, yang selanjutnya dijabarkan dalam masalah yang dialami Kecamatan yakni **Pelayanan Publik di**

Kecamatan Belum Optimal. Dari masalah Pelayanan Publik di Kecamatan Belum Optimal yang menjadi akar masalahnya adalah :

1. Pelayanan Publik di Kecamatan Nelle Belum Optimal
2. Masih Minimnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Masih Rendahnya Kesaadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Kententraman Umum
4. Masih terjadinya ketidaksinkronan antar Kelurahan atau Desa, UPTD dan Lembaga Vertikal di Kecamatan
5. Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa masih perlu ditingkatkan

Dari akar masalah Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 diatas terdapat 5 (Lima) serabut masalah yang mempunyai hubungan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan dalam pelayanan publik yakni :

1. Efektifitas pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal
2. Pemberdayaan masyarakat belum efektif
3. Koordinasi dan kapasitas pelaksana ketertiban kecamatan belum optimal
4. Kooodinasi dan kapasitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan belum optimal.
5. Pembinaan dan pengawasan desa belum efektif.

Identifikasi Masalah, Akar Masalah dan serabut masalah dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut :

Tabel .2.31

Inti Masalah, Masalah, Akar Masalah, Serabut Masalah

Inti Masalah	MASALAH	AKAR MASALAH	SERABUT MASALAH
Kualitas Pelayanan Publik belum Baik	Pelayanan Publik diKecamatan belum Optimal	1. Pelayanan Publik di Setiap Kecamatan Belum Optimal 2. Masih Minimnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Masih Rendahnya Kesaadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Kententraman Umum 4. Masih terjadinya ketidaksinkronan antar Kelurahan atau Desa, UPTD dan Lembaga Vertikal di Kecamatan 5. Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa masih perlu ditingkatkan	1. Efektifitas pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal 2. Pemberdayaan Masyarakat belum efektif 3. Koordinasi dan Kapasitas Pelaksanaan Ketertiban Kecamatan belum Optimal 4. Koordinasi dan Kapasitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan belum optimal 5. Pembinaan dan Pengawasan desa efektif

2.2.2. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Kecamatan, diperoleh baik yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan di masa lima tahun mendatang adalah **“Kualitas Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Belum Baik”**

Isu -isu Strategis Kecamatan dapat dilihat pada table 2.32 berikut :

Tabel 2.32

Teknik menyimpulkan Isu Strategi Kecamatan Nelle

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinas yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
komitmen pemerintah daerah, peningkatan profesionalisme aparatur, pemanfaatan teknologi (e-government), partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan responsivitas dalam melayani, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berbasis kebutuhan masyarakat.	pelayanan publik di Kecamatan belum optimal	Belum optimalnya ekonomi wilayah dan sistem pemerintahan	Bonus Demografi Global	Bonus Demografi		Kualitas pelayanan publik di Kecamatan Nelle belum optimal

BAB III

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Nelle 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka 2025-2029. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan harus sejalan dengan pencapaian RPJMD Kabupaten Sikka 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan.

Dari hasil telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu strategis Kecamatan, maka **tujuan** yang akan dicapai Kecamatan, yaitu: **Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.**

Tujuan Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan **indikator tujuan** yaitu **Indeks Pelayanan Publik**

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

3.2. Sasaran Rencana Strategi Kecamatan Nelle 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis ini menjadi acuan dalam menentukan langkah-langkah konkret (strategi) yang akan diambil untuk mencapai tujuan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan, dimana tugas Kecamatan adalah membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa Kecamatan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas

Untuk pencapaian tujuan kecamatan maka ditetapkan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yakni :.

1. Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan dengan indikator sasaran yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kecamatan.

2. **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas anggaran serta Kinerja Perangkat daerah**

Sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas anggaran serta Kinerja Perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat daerah.

Untuk menerangkan Tujuan dan Sasaran, Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Nelle maka dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini

TABEL 3.1
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA KECAMATAN NELLE

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.42.0000 - KECAMATAN NELLE											
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,28	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	0	76,61	77,61	78,61	79,61	80,61	81,61	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	61,5	62,5	63,5	64,5	65,5	66,5	67,5	

3.3 Strategi Kecamatan Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Nelle Tahun 2025-2029.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Kecamatan Nelle Tahun 2025-2029, maka dirumuskan strategi dan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.2.

Strategi Kecamatan Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Nelle Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	1. Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	1. Penguatan SDM dan Peningkatan partisipasi masyarakat 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi Masyarakat melalui fasilitasi pendampingan dan kolaborasi dalam program pemberdayaan desa dan kelurahan

		2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kapasitas aparatur serta memperkuat mekanisme pelayanan publik di Kecamatan
--	--	---	--

3.4 Arah Kebijakan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Nelle Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja atau pedoman yang mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Arah kebijakan berfungsi sebagai panduan untuk mengimplementasikan rencana pembangunan agar lebih sinergis dan berkelanjutan, serta memastikan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

Arah kebijakan menjabarkan strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang lebih spesifik. Arah kebijakan berfungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan. Arah kebijakan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan merumuskan arah kebijakan, dan Arah Kebijakan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Kecamatan Nelle Tahun 2025-2029 adalah Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk pelayanan dan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Untuk menerangkan tahapan arah kebijakan dari tahun 2025-2029 dapat dilihat pada **Tabel 3.3.** berikut ini :

Tabel 3.3
Tahapan Arah Kebijakan Kecamatan Nelle dari tahun 2025-2029

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk pelayanan dan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk pelayanan dan tata kelola Pemerintah an yang efektif dan akuntabel	Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk pelayanan dan tata kelola Pemerintah n yang efektif dan akuntabel	Penguata n aparatur dan kolaboras i untuk pelayana n dan tata kelola Pemerinta han yang efektif dan akuntabel	Penguatan aparatur dan kolaborasi untuk pelayanan dan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Sumber : Olahan Data Kecamatan Nelle Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program Kecamatan Nelle

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Selain itu uraian program yang jelas dan detail sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan juga memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah maka ditetapkan beberapa program sebagai pendukung pencapaian tujuan Kecamatan yakni :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Rumusan Program dapat dilihat pada table 4.1 dibawa ini :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKA TOR OUTCO ME	BASEL INE 2024	202 5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					1.306.651.505,00		1.352.343.183,00		1.639.269.322,00		1.384.434.354,00		1.400.841.861,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.168.084.605,00		1.183.776.283,00		1.470.702.422,00		1.215.867.454,00		1.232.274.961,00	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah (%)	100	100	100	1.168.084.605,00	100	1.183.776.283,00	100	1.470.702.422,00	100	1.215.867.454,00	100	1.232.274.961,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					91.777.900,00		91.777.900,00		91.777.900,00		91.777.900,00		91.777.900,00	
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100	100	100	91.777.900,00	100	91.777.900,00	100	91.777.900,00	100	91.777.900,00	100	91.777.900,00	Dinas/Bada n yang menangani Bidang Kecamatan

	(PATEN) (%)													
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					10.514.000,00		10.514.000,00		10.514.000,00		10.514.000,00		10.514.000,00	
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	100	10.514.000,00	100	10.514.000,00	100	10.514.000,00	100	10.514.000,00	100	10.514.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	100	100	100	0,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					24.845.000,00		24.845.000,00		24.845.000,00		24.845.000,00		24.845.000,00	
Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	100	24.845.000,00	100	24.845.000,00	100	24.845.000,00	100	24.845.000,00	100	24.845.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					11.430.000,00		11.430.000,00		11.430.000,00		11.430.000,00		11.430.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	100	100	100	11.430.000,00	100	11.430.000,00	100	11.430.000,00	100	11.430.000,00	100	11.430.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					1306651505.00		1352343183.00		1639269322.00		1384434354.00		1400841861.00	

1

4.2. Kegiatan Kecamatan Nelle

Uraian kegiatan membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu aktivitas. Dengan adanya uraian kegiatan yang jelas, diharapkan pelaksanaan suatu aktivitas dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari 6 Program sebagai pendukung pencapaian tujuan Kecamatan terdapat kegiatan- kegiatan yang saling terkait untuk mencapai tujuan dimaksud yakni :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Daerah
11. Fasilitaasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TABEL 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA KECAMATAN NELLE

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.42.0000 - KECAMATAN NELLE							
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

			desa dan kelurahan				
--	--	--	--------------------	--	--	--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif		Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan		Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

				Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
--	--	--	--	--	--	---	--

4.3. Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Uraian sub Kegiatan berisi deskripsi rinci dari setiap sub kegiatan yang termasuk dalam rencana. Setiap sub kegiatan perlu dijelaskan secara jelas untuk memahami apa yang akan dilakukan dan bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan dan terukur melalui indikator kinerja.

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact) .Untuk mengukur setiap indikator kinerja maka ditetapkan target berupa angka yang lebih spesifik yang akan dicapai dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang tersedia dan secara realistis.

Sedangkan pagu indikatif merupakan perkiraan anggaran yang dialokasikan untuk setiap sub kegiatan. Pagu indikatif digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang lebih rinci.

Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif dapat dilihat pada tabe 4.3 sebagai berikut :

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
KECAMATAN NELLE**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				1.306.651.505,00		1.352.343.183,00		1.639.269.322,00		1.384.434.354,00		1.400.841.861,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.168.084.605,00		1.183.776.283,00		1.470.702.422,00		1.215.867.454,00		1.232.274.961,00		
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	1.168.084.605,00	100	1.183.776.283,00	100	1.470.702.422,00	100	1.215.867.454,00	100	1.232.274.961,00	7.01.0.0 0.0.00.4 2.0000 - KECAMA TAN NELLE	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.058.800,00		11.000.000,00		12.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		

Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	15	7.058.800,00	15	11.000.000,00	15	12.000.000,00	15	10.000.000,00	15	12.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.058.800,00		11.000.000,00		12.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	15	7.058.800,00	15	11.000.000,00	15	12.000.000,00	15	10.000.000,00	15	12.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.052.829.420,00		1.063.383.605,00		1.095.498.582,00		1.099.676.714,00		1.106.084.221,00		
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	11	15	1.052.829.420,00	15	1.063.383.605,00	15	1.095.498.582,00	15	1.099.676.714,00	15	1.106.084.221,00		

	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.022.229.420,00		1.032.783.605,00		1.064.898.582,00		1.069.076.714,00		1.075.484.221,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	11	15	1.022.229.420,00	15	1.032.783.605,00	15	1.064.898.582,00	15	1.069.076.714,00	15	1.075.484.221,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30.600.000,00		30.600.000,00		30.600.000,00		30.600.000,00		30.600.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	30.600.000,00	12	30.600.000,00	12	30.600.000,00	12	30.600.000,00	12	30.600.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.552.200,00		7.748.493,00		11.000.000,00		9.500.000,00		12.500.000,00		
Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.552.200,00	1	7.748.493,00	1	11.000.000,00	1	9.500.000,00	1	12.500.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		

RENSTRA KECAMATAN NELLE TAHUN 2025-2029

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				879.200,00		1.282.976,00		1.500.000,00		500.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	879.200,00	1	1.282.976,00	1	1.500.000,00	1	500.000,00	1	1.500.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				473.000,00		865.517,00		1.500.000,00		500.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	473.000,00	1	865.517,00	1	1.500.000,00	1	500.000,00	1	1.500.000,00		

7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.200.000,00		1.200.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	2.500.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.000.000,00		2.400.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	2.000.000,00	12	2.400.000,00	12	4.500.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				23.273.100,00		23.273.100,00		273.273.100,00		18.260.000,00		23.260.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	23.273.100,00	3	23.273.100,00	3	273.273.100,00	2	18.260.000,00	2	23.260.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	50		50		50		50		50			

7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		250.000.000,00		0,00		0,00				
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00				
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				6.260.000,00		6.260.000,00		6.260.000,00		6.260.000,00		6.260.000,00				
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	50	6.260.000,00	50	6.260.000,00	50	6.260.000,00	50	6.260.000,00	50	6.260.000,00				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETE RANG AN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.013.100,00		17.013.100,00		17.013.100,00		12.000.000,00		17.000.000,00				
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	17.013.100,00	3	17.013.100,00	3	17.013.100,00	2	12.000.000,00	2	17.000.000,00				
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36.371.085,00		36.371.085,00		36.930.740,00		36.430.740,00		36.430.740,00				
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	12	36.371.085,00	12	36.371.085,00	12	36.930.740,00	12	36.430.740,00	12	36.430.740,00				

	Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				940.345,00		940.345,00		1.500.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	940.345,00	12	940.345,00	12	1.500.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				15.430.740,00		15.430.740,00		15.430.740,00		15.430.740,00		15.430.740,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	15.430.740,00	12	15.430.740,00	12	15.430.740,00	12	15.430.740,00	12	15.430.740,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah				42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	42.000.000,00	1	42.000.000,00	1	42.000.000,00	1	42.000.000,00	1	42.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4		4		8		4		4			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin	4	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	8	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00		

Peralatan dan Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara (Unit)													
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				91.777.900,00		91.777.900,00		91.777.900,00		91.777.900,00		91.777.900,00		
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) (%)	100	100	91.777.900,00	100	91.777.900,00	100	91.777.900,00	100	91.777.900,00	100	91.777.900,00	7.01.0.0 0.0.00.4 2.0000 - KECAMATAN NELLE	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				77.377.900,00		77.377.900,00		77.377.900,00		77.377.900,00		77.377.900,00		

Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12	12	77.377.900,00	12	77.377.900,00	12	77.377.900,00	12	77.377.900,00	12	77.377.900,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				52.540.000,00		52.540.000,00		52.540.000,00		52.540.000,00		52.540.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	12	12	52.540.000,00	12	52.540.000,00	12	52.540.000,00	12	52.540.000,00	12	52.540.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				24.837.900,00		24.837.900,00		24.837.900,00		24.837.900,00		24.837.900,00		

Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	24.837.900,00	1	24.837.900,00	1	24.837.900,00	1	24.837.900,00	1	24.837.900,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	14.400.000,00	12	14.400.000,00	12	14.400.000,00	12	14.400.000,00	12	14.400.000,00		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				14.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00		14.400.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	12	14.400.000,00	12	14.400.000,00	12	14.400.000,00	12	14.400.000,00	12	14.400.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				10.514.000,00		10.514.000,00		10.514.000,00		10.514.000,00		10.514.000,00		
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan (%)	100	100	10.514.000,00	100	10.514.000,00	100	10.514.000,00	100	10.514.000,00	100	10.514.000,00	7.01.0.0 0.0.00.4 2.0000 - KECAMATAN NELLE	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				10.514.000,00		10.514.000,00		10.514.000,00		10.514.000,00		10.514.000,00		

Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	10.514.000,00	10	10.514.000,00	10	10.514.000,00	10	10.514.000,00	10	10.514.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10.514.000,00		10.514.000,00		10.514.000,00		10.514.000,00		10.514.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10	10.514.000,00	10	10.514.000,00	10	10.514.000,00	10	10.514.000,00	10	10.514.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor yang efektif dan partisipatif	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketenteraman Umum (%)	100	100	0,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.0 0.000.4 2.0000 - KECAMA TAN NELLE	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		

7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				24.845.000,00		24.845.000,00		24.845.000,00		24.845.000,00		24.845.000,00		
Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan akuntabel di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan (%)	100	100	24.845.000,00	100	24.845.000,00	100	24.845.000,00	100	24.845.000,00	100	24.845.000,00	7.01.0.0 0.0.0.4 2.0000 - KECAMA TAN NELLE	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				24.845.000,00		24.845.000,00		24.845.000,00		24.845.000,00		24.845.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	24.845.000,00	12	24.845.000,00	12	24.845.000,00	12	24.845.000,00	12	24.845.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				24.845.000,00		24.845.000,00		24.845.000,00		24.845.000,00		24.845.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	24.845.000,00	12	24.845.000,00	12	24.845.000,00	12	24.845.000,00	12	24.845.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				11.430.000,00		11.430.000,00		11.430.000,00		11.430.000,00		11.430.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	persentase kegiatan pembinaan dan	100	100	11.430.000,00	100	11.430.000,00	100	11.430.000,00	100	11.430.000,00	100	11.430.000,00	7.01.0.0 0.0.0.4 2.0000 - KECAMA	

	pengawasan yang dilakukan (%)												TAN NELLE	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.430.000,00		11.430.000,00		11.430.000,00		11.430.000,00		11.430.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERA H	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5	5	11.430.000,00	5	11.430.000,00	5	11.430.000,00	5	11.430.000,00	5	11.430.000,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11.430.000,00		11.430.000,00		11.430.000,00		11.430.000,00		11.430.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5	5	11.430.000,00	5	11.430.000,00	5	11.430.000,00	5	11.430.000,00	5	11.430.000,00		

4.4. Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah,

Daftar Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

TABEL 4.4
DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA KECAMATAN NELLE

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.42.0000 - KECAMATAN NELLE				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
3.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra maka ditentukan target melalui Indikator Kinerja Utama. Dari tujuan, sasaran serta indikator yang sudah dijelaskan tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nelle bagaimana dijelaskan pada table 4.5 dibawah ini:

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN NELLE

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.42.0000 - KECAMATAN NELLE									
INDIKATOR KINERJA UTAMA										
2.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,28	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	0	76,61	77,61	78,61	79,61	80,61	81,61	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	61,5	62,5	63,5	64,5	65,5	66,5	67,5	
INDIKATOR KINERJA DAERAH										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,28	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerinatahanyang mengukur pencapaian target dengan menggunakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif Kecamatan sebagai unsur kewilayahan tidak memiliki indikator kunci

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup Renstra Kecamatan ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan.

